



MANUAL IKU PPN PENGAMBENGAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, maka Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Level II Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan ini dapat diselesaikan. Pedoman pengukuran ini disusun untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan terukurnya output serta outcome yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran, pengelolaan, dan penyajian data kinerja sehingga meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pembangunan perikanan tangkap.



Pengambangan, 23 Januari 2024
Kepala Pelabuhan,

Andi M. Nojengi

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 lingkup UPT

No	IKU	Keterangan	Target	Periode	Pola Perhitungan
	Teknis				
1	Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu	Lampiran pada excel	triwulan	Nilai Posisi Akhir
2	Volume produksi perikanan tangkap	Sama dengan tahun lalu		triwulan	Nilai Posisi Akhir
3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi	perubahan manual IKU		tahunan	Nilai Posisi Akhir
4	Tingkat Kinerja pelabuhan perikanan	Sama dengan tahun lalu		triwulan	Rata-rata
5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		tahunan	Nilai Posisi Akhir
6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	perubahan manual IKU		tahunan	Nilai Posisi Akhir
7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		triwulan	Rata-rata
8	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Sama dengan tahun lalu		triwulan	Nilai Posisi Akhir
9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Pelindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	Sama dengan tahun lalu		tahunan	Nilai Posisi Akhir
	Dukungan Manajerial				
10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu	Lampiran pada excel	tahunan	Nilai Posisi Akhir
11	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (nama satker) (yang telah dinilai WBK)	Sama dengan tahun lalu		tahunan	Nilai Posisi Akhir
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		triwulan	Nilai Posisi Akhir
13	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		tahunan	Nilai Posisi Akhir
14	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		semester	Nilai Posisi Akhir
15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		tahunan	Nilai Posisi Akhir
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		tahunan	Nilai Posisi Akhir
17	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		semester	Nilai Posisi Akhir
18	Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu		tahunan	Nilai Posisi Akhir
19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan	Sama dengan tahun lalu	triwulan	Nilai Posisi Akhir	

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.• Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	:	Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Juta Rupiah
Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
Sumber Data	:	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	760,97

2. Volume produksi perikanan tangkap di Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat										
Nama IKU	:	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan										
Definisi	:	Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.										
Formula Perhitungan	:	$Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$										
		<table><tr><td>Keterangan:</td><td>Keterangan:</td></tr><tr><td>$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut</td><td>Nilai TW I = capaian TW I</td></tr><tr><td>$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat</td><td>Nilai TW II = capaian TW I + TW II</td></tr><tr><td></td><td>Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III</td></tr><tr><td></td><td>Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV</td></tr></table>	Keterangan:	Keterangan:	$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut	Nilai TW I = capaian TW I	$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat	Nilai TW II = capaian TW I + TW II		Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III		Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Keterangan:	Keterangan:											
$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut	Nilai TW I = capaian TW I											
$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat	Nilai TW II = capaian TW I + TW II											
	Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III											
	Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV											
Satuan	:	Ton										
Tingkat Validitas	:	Outcome										
Sumber Data	:	Tim Kerja Operasional Pelabuhan										
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir										
Polarisasi	:	Maximize										
Periode Pelaporan	:	Triwulanan										
Metode Cascading	:	Buat Baru										
Target	:	14.479										

3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing
Nama IKU	:	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Fungsi perusahaan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan.• Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan perusahaan.
Formula Perhitungan	:	Indikator I : $\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan terhadap usulan perusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan perusahaan yang masuk di (nama satker)}} \times 80\%$ Indikator II : Ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 % Persentase Perusahaan = Indikator I + Indikator 2
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Perusahaan
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	100

4. Tingkat Kinerja Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan : Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing

Nama IKU : Tingkat Kinerja PPN Pengembangan

Definisi : Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan :

$$NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$$

Keterangan :

1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:

Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Satuan	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output kendali rendah	Periode Pelaporan	: Triwulanan
Sumber Data	: Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Metode Cascading	: Buat Baru
Pola Perhitungan	: Rata-rata	Target	: 84

5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing
Nama IKU	:	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan: <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
Formula Perhitungan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1)2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2)3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = $100 - [(jumlah\ permintaan\ verifikasi\ SHTI / jumlah\ SHTI\ yang\ diterbitkan) \times 100]$..... (x3) <p>Tingkat Pelayanan = $x1 + x2 + x3$</p>
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	84

6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal
Nama IKU	:	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
Sumber Data	:	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	10,31

7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal		
Nama IKU	:	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan		
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk score Pelabuhan 		
Formula Perhitungan	:	Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)		
		Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)		
		Kategori		
		Kurang : 0-30	Baik : >61 - 80	
		Cukup : >30-60	Sangat Baik : >81 – 100	
		Keterangan:		
		Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV		
Satuan	:	Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi	Periode Pelaporan	: Triwulanan
Sumber Data	:	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Metode Cascading	: Buat Baru
Pola Perhitungan	:	Rata-rata	Target	: 30,10

Keterangan:

Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)

Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengambengan
Nama IKU	:	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh (nama satker)
Formula Perhitungan	:	Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) oleh (nama satker), dengan ketentuan target tahun berjalan ditambah dengan capaian tahun sebelumnya
		Keterangan: Nilai TW I = capaian 2023 + capaian TW I; Nilai TW II = capaian 2023 + capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian 2023 + capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian 2023 + capaian TW I + TW II + TW III + TW IV
Satuan	:	Kapal
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	1.043

9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Pelindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan



Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Pelindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan
Definisi	:	Merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan
Formula Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi di (Nama Satker)}}{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL / PKL di (Nama Satker)}} \times 100\%$
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	25

10. Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengambangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengambangan
Nama IKU	:	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan PPN Pengambangan
Definisi	:	Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	:	Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, yang terdiri dari Komponen pengungkit 60% (Manajemen Perubahan 5%; Penataan Tatalaksana 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%; Penguatan Pengawasan 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%) Komponen Hasil 40%
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	ITJEN KKP
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	45,10

11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan
Formula Perhitungan	:	$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$ <p>Keterangan: RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT</p>
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	80

12. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%)
Formula Perhitungan	:	Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	94

13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	:	Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	ROPEG KKP
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	84

14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengambangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengambangan
Nama IKU	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan PPN Pengambangan
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: <ul style="list-style-type: none">• Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)• Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).• Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).• Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	80

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: <ul style="list-style-type: none">• Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);• Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);• Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019-2022 (bobot 20%);• Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);• Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).
Satuan	:	Persen
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	80

16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Formula Perhitungan	:	Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	OM SPAN Kemenkeu
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Semesteran
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	93,76

17. Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya
Formula Perhitungan	:	Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atsa Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%
Satuan	:	Nilai
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	86

18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Perikanan Nusantara Pengembangan



Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pengembangan
Nama IKU	:	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan PPN Pengembangan
Definisi	:	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
Formula Perhitungan	:	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP
Satuan	:	Indeks
Tingkat Validitas	:	Output kendali tinggi
Sumber Data	:	Tim Kerja Dukungan Manajerial
Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi akhir
Polarisasi	:	Maximize
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Metode Cascading	:	Buat Baru
Target	:	88,3